

**MANAJEMEN ORGANISASI PARTAI POLITIK
(TELAAH TERHADAP PERSIAPAN PEMILU LEGISLATIF 2014
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DEWAN PERWAKILAN
WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial Islam Strata I

Disusun Oleh:

Moh. Ludfi
NIM. 08240021

Pembimbing:

Achmad Muhammad, M. Ag
NIP. 19720719 200003 1 002

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/17/9/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

MANAJEMEN ORGANISASI PARTAI POLITIK
(TELAAH TERHADAP PERSIAPAN PEMILU LEGISLATIF 2014 PARTAI
PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DEWAN PERWAKILAN WILAYAH
YOGYAKARTA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

N a m a : MOH. LUDFI
Nomor Induk Mahasiswa : 08240021
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 09 Oktober 2013
Nilai Munaqasyah :

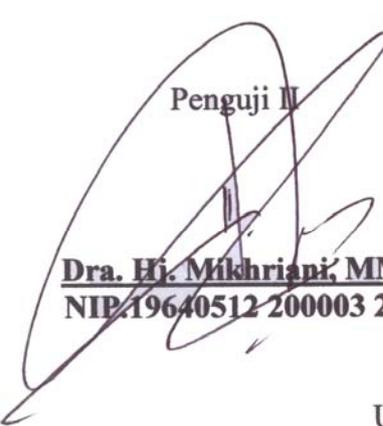
dan dinyatakan diterima di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

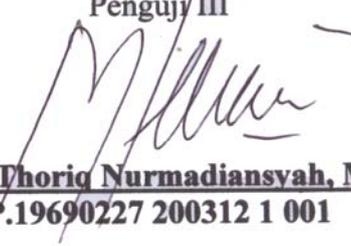
Pembimbing/Penguji I,


Achmad Muhammad, M. Ag
NIP. 19720719 200003 1 002

Penguji II


Dra. Hj. Mikhriani, MM
NIP. 19640512 200003 2 001

Penguji III


M. Thoriq Nurmadiansyah, M.Si
NIP. 19690227 200312 1 001

Yogyakarta, 24 Oktober 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Dakwah
Dekan

Dr. H. Waryono Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19701010 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Jl. Marsada Adisucipto, telepon (0274) 155856, Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : MOH. LUDFI

NIM : 08240021

Judul Skripsi : **MANAJEMEN ORGANISASI PARTAI POLITIK
(TELAAH TERHADAP PERSIAPAN PEMILU
LEGISLATIF 2014 PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (PPP) DEWAN PERWAKILAN
WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Prodi Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata Satu dalam Ilmu Sosial Islam.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2013

Pembimbing,

Achmad Muhammad, M. Ag
NIP. 19720719 200003 1 002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. LUDFI
NIM : 08240021
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **MANAJEMEN ORGANISASI PARTAI POLITIK (TELAAH TERHADAP PERSIAPAN PEMILU LEGISLATIF 2014 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DEWAN PERWAKILAN WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 21 Oktober 2013

Yang menyatakan,



MOH. LUDFI
NIM. 08240021

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kami persembahkan untuk :

*Kedua Orang tuaku H.Bukhori dan Hj. Siti Mufidah,
yang telah meberikan dukungan baik materi maupun
imateri sehingga tujuan beliau dalam mendidik anak-
anaknya tercapai dengan baik.*

*Untuk keluargaku yang tercinta, yang ada di pulau
Madura dan keluarga besar yang terkasih adinda “Rina
Arifati” di Yogyakarta.*

*Uuntuk seluruh jajaran Pengurus DPW PPP DIY
khususnya H.M. Syukri Fadholi, SH, Bambang Aris
Sudjoko dan DRS. Ma’sum Amrullah.*

*Untuk sahabat-sahabatku yang ada dijogjakarta
maupun di madura yang tidak bisa kami sebutkan satu
persatu.*

*Untuk Almamaterku tercinta: Madrasah ibtidaiyah
Tarbiyatus Shiblyan lenteng barat Sumenep, Ponpes
Annuqayah Guluk2 Sumenep, MD Fakultas Dakwah,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

MOTTO

“Jangan jual idealisme dengan kekuasaan”¹



¹ Diskusi Korp Gemilang PMII Rayon Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2008.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan tulus dipersembahkan ke hadirat Allah SWT. Dialah tuhan yang menurunkan agama melalui wahyu yang di sampaikan kepada rasul pilihan-Nya.melalui agama ini terbentang luas jalan lurus yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswah Hasannah Nabi Muhammad SAW., beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Segala usaha dan upaya yang maksimal telah dilakukan demi terwujudnya skripsi ini sebagai karya ilmiah yang baik. Namun, kerana keterbatasan dan kemampuan peneliti, maka kritik yang konstruktif terhadap penelitian ini senantiasa diharapkan.

Skripsi yang berjudul **MANAJEMEN ORGANISASI PARTAI POLITIK (TELAAH TERHADAP PERSIAPAN PEMILU LEGISLATIF 2014 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DEWAN PERWAKILAN WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**. Maksud dan tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Harapan peneliti semoga karya skripsi ini bernilai ibadah dan bermamfaat serta memberikan sumbangan yang cukup berharga dalam studi pengembangan terkait keilmuan Manajemen Dakwah khususnya, serta diharapkan bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil,makmur dan sejahtera kini sampai masa depan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini dihaturkan penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Dra Siti Fatimah, M.Pd selaku Ketua jurusan Manajemen Dakwah
4. Ruspita Rani Pratiwi selaku Pembimbing Akademik Jurusan MD
5. Achmad Muhammad, M.Ag selaku Pembimbing skripsi
6. Sahabat-Sahabat seperjuangan yang tidak bisa kami disebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dan sudi membantu penyelesaian skripsi ini, tidak ada yang dapat penulis haturkan kecuali do'a tulus semoga semua bantuan dan dukungannya dapat dibalaskan oleh Allah di dunia sampai akhirat amiiin.

Yogyakarta, 21 Oktober 2013

Penulis

MOH. LUDFI
NIM. 08240021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Kerangka teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	33
H. Sistematika Pembahasan	40
BAB II GAMBARAN UMUM PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
A. Kondisi Objektif PPP.....	42
1. Profil PPP	42
2. Ideologi Partai	45
3. VISI PPP	48
4. MISI PPP.....	52
B. Makna dan Lambang PPP	53
C. Kepengurusan.....	55
D. Prinsip Perjuangan Partai	55
BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS PARTAI DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014	
A. Rancangan Pemenangan Pemilu	60
1. Dalam Perspektif Agama	61
2. Dalam Persepektif Politik.....	65
3. Dalam Perspektif Ekonomi	68
4. Dalam Perspektif Hukum dan HAM.....	72

5. Dalam Perspektif Sosial-Kemasyarakatan dan Kebudayaan	75
6. Dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat.....	79
7. Dalam Perspektif Hubungan Internasional	81
B. Manajemen Organisasi Partai dalam Persiapan Pemilu	83
1. Konsolidasi dan Penguatan Fungsi Organisasi	83
2. Kaderisasi	89
3. Membangun Citra Partai	92
4. Pemberdayaan Kaum Perempuan	95
5. Pengembangan Jaringan dan Basis Konstituen.....	95
6. Mobilisasi Sumber Dana (<i>Fund Raising</i>).....	99
C. Strategi Politik Partai dalam Pemilu 2014	100
1. Penguatan fungsi kelembagaan	101
2. Menentukan prioritas program	101
3. Ideologisasi dalam gerakan partai	102
4. Silaturahmi sebagai model gerakan	102
5. Kepemimpinan dan pola pengendalian pelaksanaan program	103
6. Kerja sama dengan kelompok-kelompok strategis	104
D. Program Pemenangan Pemilu 2014	104
1. Perencanaan dan Persiapan	107
2. Pemetaan Potensi	109
3. Sosialisasi Program	110
4. Pengelolaan kampanye Pemilu	110
5. Pengawasan Pemungutan Suara	110
6. Pengawasan dan Pengamanan Hasil Pemungutan Suara	111

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
C. Kata Penutup	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Indonesia menyelenggarakan pemilu untuk memilih wakil-wakilnya di pemerintahan atau memilih presiden atau wakilnya. Partai politik merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Partisipasi politik ini merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimana dalam hal ini partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. PPP merupakan salah satu partai politik yang konsisten dalam berpartisipasi politik selama perhelatan politik di negeri di mana mas Orde Baru, partai PPP menunjukkan tajinya.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, ada hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh yakni bagaimana penerapan manajemen organisasi pada Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam persiapan pemilu legislatif 2014? Dari persoalan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Dari penelitian ini menggunakan 3 informan yang menjadi sumber data utama.

Dari hasil yang dideskripsikan dalam penelitian ini, maka dapat ditemukan bahwa kajian strategis rancangan pemenangan pemilu dilihat dari perspektif agama, politik, ekonomi, hukum dan HAM, sosial-kemasyarakatan dan budaya, kesejahteraan masyarakat dan hubungan internasional. Manajemen organisasi partai dalam persiapan pemilu adalah konsolidasi dan penguatan fungsi organisasi, kaderisasi, membangun citra partai, pemberdayaan kaum perempuan, pengembangan jaringan dan basis konstituen, dan mobilisasi sumber dana (*Found Raising*). Sedangkan untuk strategi pemenangan pemilu yang dilakukan oleh ppp adalah penguatan fungsi kelembagaan, menentukan prioritas program, ideologisasi dalam gerakan partai, silaturahmi sebagai model gerakan, kepemimpinan dan pola pengendalian pelaksanaan program, kerja sama dengan kelompok-kelompok strategis.

Dari proses tersebut, maka menghasilkan program pemenangan pemilu 2014 seperti, perencanaan dan persiapan, pemetaan potensi, sosialisasi program, pengelolaan kampanye pemilu, pengawalan pemungutan suara, dan pengawalan dan pengamanan hasil pemungutan suara.

Kata Kunci: *Manajemen, Organisasi dan Partai Politik*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum memasuki pembahasan, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dari judul penelitian ini. Penegasan ini dimaksudkan untuk membatasi persoalan dan menghindari salah penafsiran. Artinya, dengan adanya penegasan setiap kata, maka semuanya menjadi jelas, terarah dan mudah dipahami. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul **”Manajemen Organisasi Partai Politik (Telaah Terhadap Persiapan Pemilu Legislatif 2014 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)”** adalah:

1. Manajemen Organisasi

Istilah manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to manage*, yang mempunyai sinonim antara lain sebagai; *to hand* berarti mengurus; *to control* berarti memeriksa; dan *to guide* yang berarti memimpin.¹ Sedang jika ditinjau dari segi istilah atau terminologi mengandung beberapa pengertian, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Sondang P Siagian di dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Administrasi* mendefinisikan manajemen sebagai kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang

¹ Muhtar Efendy, *Manajemen Islam* (Jakarta: Batara Karya Aksara, 1986), hal. 9.

lain.² Sedang menurut G.R. Terry di dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Management*, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.³

Sedangkan organisasi adalah sebuah kesatuan sosial yang koordinasi secara bebas dengan batas yang relatif dapat diidentifikasi, yang berfungsi atas dasar yang relatif berkesinambungan untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan bersama.⁴ Dari definisi organisasi di atas, disebutkan bahwa organisasi merupakan kumpulan dua orang atau lebih. Kumpulan ini harus memiliki tujuan bersama dan melakukan kerjasama untuk mewujudkan tujuan tersebut, hal ini yang menjadi pembeda antara organisasi dengan sekumpulan orang. Misalnya, orang-orang yang berada di sebuah halte merupakan sekelompok orang yang berada di sebuah tempat, namun tidak mempunyai tujuan yang sama, bisa jadi orang-orang yang sedang menunggu sebuah kendaraan umum tapi ada juga orang yang sekedar berteduh. Kalaupun sekelompok orang tersebut memiliki tujuan yang sama untuk menunggu kendaraan umum, namun mereka tidak melakukan interaksi dan kerja sama satu sama lain sehingga sekelompok orang ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah

² Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), hal. 5.

³ G.R. Terry, *Principles of Management*, Winardi, pent. (Bandung: Alumni, 1986), hal. 4.

⁴ Fremont E. Kast & James E. Rosenzweig, *Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara 1995), hal. 2.

organisasi. Apabila kemudian orang-orang dalam halte tersebut saling berinteraksi dan memutuskan untuk bekerjasama mencari satu kendaraan tertentu, maka sekelompok orang ini telah berubah menjadi sebuah organisasi sederhana. Dengan demikian, kerjasama dan tujuan bersama merupakan indikator yang membedakan organisasi dengan sekumpulan orang.

Organisasi terbentuk atas dasar kebutuhan tiap anggotanya yang termanifestasi dalam tujuan organisasi.⁵ Organisasi yang masih sederhana biasanya juga memiliki tujuan yang sederhana, tujuan ini dapat berkembang sehingga kompleksitas kerja dalam organisasi tersebut akan bertambah dan organisasi pun akan berkembang.⁶ Adakalanya ketika tujuan dan kompleksitas organisasi menjadi berkembang, individu didalamnya merasa bahwa kebutuhannya tidak dapat terwujud lagi dalam tujuan organisasi tersebut, sehingga ia dapat meninggalkan organisasi dan mencari organisasi lain yang lebih sesuai untuknya. Organisasi tersebut dapat tetap berjalan dan bekerjasama dengan orang-orang didalamnya serta dapat terus dilakukan untuk memenuhi tujuan organisasi, walaupun para anggotanya terus berganti.

Jadi yang dimaksud dengan manajemen organisasi disini adalah suatu proses yang signifikan antara mesin dan manusia. Pada

⁵Sondang P.Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara 1993) hal. 327.

⁶ Fremont E.Kast & James E.Rosenzweig, *Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara 1995) hal. 5.

dasarnya mesin itu diciptakan oleh manusia agar memberikan respon terhadap suatu input tertentu yang perintahnya valid. Mesin merupakan alat bantu manusia untuk memudahkan berbagai kegiatan manusia. Perbedaan utama antara mesin dan manusia adalah letak respon mesin yang bersifat empiris atau presentase keberhasilan terbaik dan presentase resiko lebih minim. Seorang manusia dapat memberikan respons yang beraneka ragam sekalipun diberi input yang sama. Apalagi bila input tersebut diberikan kepada manusia lain. Banyak hal yang mempengaruhi output yang berbeda yang dilakukan manusia terhadap satu input, yaitu; 1. Ilmu pengetahuan yang dimiliki 2. Pengalaman 3. Asumsi atau perkiraan 4. Lingkungan 5. Kondisi psikologis.⁷

2. Partai Politik

Berdasarkan ilmu hukum tata negara, Asshiddiqie mengungkapkan, terdapat beragam pandangan mengenai partai politik. Salah satu kubu, antara lain dipelopori oleh Schattschneider melihat partai politik sebagai pilar penentu demokrasi, yang oleh karenanya sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam suatu sistem politik yang demokratis. Di sisi lain, terdapat pula pandangan skeptis dan kritis yang melihat partai politik tidak lebih

⁷ Covey, S.R., *The 8th habits: From Effectiveness to Greatness*, (New York USA: Free Press, 2004), hal. 10-13.

dari kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau yang ingin berkuasa.⁸

Menurut Asshiddiqie sendiri, partai politik sendiri dapat diartikan:

“suatu bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis, yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan, sehingga berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*value and interest*) dari konstituen yang diwakilinya. Dengan kata lain, partai politik adalah media aspirasi bagi masyarakat luas untuk ikut dalam proses penentuan kebijakan dalam kehidupan bernegara”.⁹

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 pasal 1, definisi partai politik adalah “organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹⁰

3. Pemilu Legislatif

Pemilihan legislatif adalah salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi. Salah satu konsepsi modern diajukan oleh Joseph

⁸ Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara – Jilid II*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006) hal.20-23.

⁹ *Ibid.*, hal. 27.

¹⁰ Lihat dalam UU tentang pengaturan Partai Politik Nomor 83 Tahun 2012.

Scumpeter¹¹ yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan legislatif yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik untuk tujuan menghasilkan calon anggota yang mewakili rakyat. Hal ini dilandasi oleh partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan menguasai tampuk pimpinan. Anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga wakil rakyat dan pemerintahan. Hak-hak sipil dan kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi.¹²

Secara keseluruhan makna yang dimaksud dalam pengertian di atas, sebagai batasan penegasan judul adalah pemilu yang diusung dari rakyat untuk menentukan wakilnya dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini dengan melihat proses persiapan partai dalam mengelola dan menentukan calon anggota legislator di daerah maupun di pusat. Biasa yang kita kenal dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

¹¹ Joseph Scumpeter , *Capitalism, Socialism, and Democracy*, (New York : Harper), 1947, hal. 17.

¹² Mochtar Mas'ood, *Negara, Kapital dan Demokrasi*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal 43.

4. DPW PPP Yogyakarta

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan hasil fusi politik Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973, merupakan partai politik penerus estafet empat partai Islam dan wadah penyelamat aspirasi umat Islam, serta cermin kesadaran dan tanggung jawab tokoh-tokoh umat Islam dan pimpinan partai untuk bersatu, bahu membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT melalui perjuangan politik.¹³

Setelah berdiri partai, maka untuk melakukan kekuatan politik dan konsolidasi antar tingkat daerah maka diperlukan pembentukan perwakilan wilayah atau daerah yang disingkat menjadi Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kajian dalam penelitian ini adalah wilayah atau daerah yang mempunyai peran strategis dalam melakukan konsolidasi partai ditingkat daerah. Maka sesuai dengan kaidah tersebut, fokus kajian dalam penelitian ini adalah tentang persiapan dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2014 mendatang.

Secara keseluruhan, yang dimaksudkan penulis tentang "Manajemen Organisasi Partai Politik (Telaah Terhadap Persiapan

¹³ Ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan (PPP), *Khittah dan Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan*, dalam www.ppp.or.r, tahun 2007, hal. 5.

Pemilu Legislatif 2014 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Istimewa Yogyakarta)” adalah akan mengkaji terhadap persiapan strategis yang dilakukan oleh PPP dengan mengelola manajemen organisasi partai dalam upaya mencapai tujuan kemenangan pemilu legislatif di tahun 2014.

B. Latar Belakang Masalah

Partai politik adalah instrumen yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah proses terbentuknya demokrasi. Hal ini dilandasi oleh cita-cita untuk menuju harapan bersama demi terwujudnya seorang pemimpin pada masyarakat dan bangsa. Partai politik sebagai perjuangan masyarakat dalam sebuah sistem demokrasi dibutuhkan sebuah manajemen organisasi yang terorganisir dengan baik. Demi tercapainya cita-cita perjuangan dalam internal partai itu sendiri.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membutuhkan pola organisasi yang cukup komprehensif dalam menghadapi momentum pemilu. Dalam persiapan pemilu legislatif pada tahun 2014 sebuah partai harus dengan giat melakukan organisasi partai yang efisien dan komprehensif. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai yang cukup lama pada kancah demokrasi di Indonesia, tentu mempunyai arah dan pencapaian yang cukup mapan. Untuk itulah, partai Persatuan Pembangunan (PPP) membutuhkan reaktualisasi pada wacana kekinian.

Oleh sebab itu, bagi semua elemen partai dalam melakukan proses pembaruan dibutuhkan pula pola manajemen organisasi yang baik.

Karena proses demokrasi butuh alat untuk mencapai sebuah tujuan yakni dibutuhkan partai politik. Sebagai instrumen pencapaian demokrasi itu adalah melalui prosesi pemilu. Dimana pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern. Joko Prihatmoko mengutip di dalam *Journal of Democracy 11*, bahwa pemilu disebut “bermakna” apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, dan keefektifan. Sebagai salah satu sarana demokratis. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang terbuka dan bersifat massal, sehingga diharapkan dapat berfungsi dalam proses pendewasaan dan pencerdasan pemahaman politik masyarakat.¹⁴ Melalui pemilu akan terwujud suatu infrastruktur dan mekanisme demokrasi serta membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Masyarakat diharapkan pula dapat memahami bahwa fungsi pemilu itu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pergantian pemerintahan secara teratur.¹⁵

Indonesia menyelenggarakan pemilu untuk memilih wakil-wakilnya di pemerintahan atau memilih presiden atau wakilnya. Partai politik merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Partisipasi

¹⁴ Joko Prihatmoko, “Makna Pemilu Bagi Perubahan Bangsa”, dalam *Jurnal of Democracy* Vol.1 Tahun 2011.

¹⁵ Syamsuddin Haris. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988), hal.152.

politik ini merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimana dalam hal ini partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.¹⁶

Secara universal pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*).¹⁷ Pemilihan umum disebut juga dengan “*political market*” sebagaimana yang diungkapkan Indria Samego¹⁸, artinya pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio), maupun audio visual (televisi), serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran, bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobi yang berisi janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga

¹⁶ Samuel.P.Huntington, dan Nelson, Joan. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal.6.

¹⁷ Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hal. 33.

¹⁸ Samego Indria, *Book Review Ekonomi Politik, Pasca Sarjana Ilmu Politik*, Universitas Nasional, Jakarta, 2000) hal. 28.

pada waktu pemilihan suara dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.

Dari kondisi tersebut yang menjadi menarik dan terpanggil untuk meneliti lebih jauh adalah terkait pola manajemen yang diterapkan. Karena dalam teori manajemen tidak ada unsur dalam pelaksanaannya hal negative seperti politik yang transaksional dan budaya konsumerisme konstituen partai. Maka dari itu, instrumen demokrasi yang telah diungkapkan seperti di atas adalah partai politik. Dimana dalam hal ini prosesi pemilu pasti selalu diwarnai dengan pemilu. Akan tetapi, dalam kesempatan ini yang akan kita bahas dalam penelitian ini tentang partai politik PPP dalam prosesi persiapan pemilu tahun 2014. Penulis merasa tertarik dalam meneliti kajian tersebut karena secara kapabilitas organisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki suatu wadah organisasi yang mapan. Selain sebagai partai yang cukup tua di republik ini, dari itu pula Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempunyai *grassroots* yang cukup mapan di beberapa daerah, terutama di wilayah yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penerapan manajemen organisasi pada Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam persiapan pemilu legislatif 2014?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem organisasi di partai politik Partai Persatuan Pembangunan, lebih khusus pada penerapan persiapan pemilu yang dilakukan oleh DPW PPP Yogyakarta.
- b. Agar memberikan kontribusi wacana atau pengetahuan terhadap civitas akademika atau publik. Dengan hasil penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui dan tumbuh suatu kesadaran berdemokrasi dan berorganisasi yang baik dan benar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Kegunaan teoritik penelitian ini adalah untuk merencanakan perbaikan dan penyempurnaan dalam kegiatan partai politik khususnya bagi perbaikan PPP DPW Yogyakarta dalam mempersiapkan kadernya untuk mengisi pos pemerintahan. Kemudian, diharapkan juga menjadi sumbangan pemikiran bagi para politisi dalam menghadapi manajemen organisasi masa baik di internal maupun eksternal (masyarakat).

b. Kegunaan Empirik

Kegunaan empirik penelitian ini adalah kegunaan secara praktis dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi DPW PPP Yogyakarta dalam meningkatkan manajemen organisasi partai untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam sistem manajemen partai sehingga mampu menjadi representasi masyarakat pada umumnya. Serta pengalaman yang besar terhadap penulis karena dengan diadakannya penelitian ini maka penulis dapat menambah pengetahuan tentang manajemen organisasi partai politik. Lebih khususnya diharapkan mampu memberikan distribusi gagasan bagi jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

E. Telaah Pustaka

Berangkat dari survei yang penulis telusuri diberbagai media mulai dari UPT-Strata-1 (UPT-S1) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan kota Yogyakarta, menunjukkan bahwa kajian untuk tulisan skripsi yang terkait dengan penelitian ini adalah *pertama*, karya Bahrul Huda tentang Strategi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Pemilu Legislatif 2009 Melalui Pendekatan Sosio-ekonomi Kerakyatan (Studi Pemenangan Ahmad Salim di Dapil 3 Kabupaten

Sumenep).¹⁹ Karya ini membahas lebih jauh tentang strategi pemenangan pemilu dalam proses pemilihan legislatif di daerah Madura yang tergolong dapil 3 di Propinsi Jawa Timur. Kajian yang lebih spesifiknya adalah menjelaskan bagaimana konsep ekonomi-kerakyatan yang diusung oleh PPP dalam menarik simpatik masyarakat agar memilih dan loyal terhadap partai dan calon yang diusung oleh partai tersebut. Sehingga secara narasi penelitian tidak ada kesamaan yang signifikan dengan penelitian yang akan penulis kaji dalam skripsi ini.

Kedua, karya Abdullah tentang Membangun Citra Partai Politik Masa Depan (studi Deskriptif Strategi Humas Partai Persatuan Pembangunan Sleman DIY dalam Membangun Citra).²⁰ Karya ini membahas tentang penjelasan citra partai politik terhadap masyarakat atau menjelaskan tentang menarik simpatik masyarakat dalam berpartai. Karya ini sebagai objek kajian sama dengan penelitian yang penulis kaji, tetapi secara metode penelitian dan rangkaian kajian pustaka tidak ada kemiripan dengan penelitian ini. Sehingga secara definitif dan fokus kajian dalam karya Abdullah ini lebih menitiktekan pada bagaimana membangun citra positif dihadapan masyarakat di masa depan, demi terwujudnya partisipasi memilih pada prosesi pemilu berlangsung di masa yang akan datang.

¹⁹ Bahrul Huda, "Strategi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Pemilu Legislatif 2009 Melalui Pendekatan Sosio-ekonomi Kerakyatan (*Studi Pemenangan Ahmad Salim Di Dapil 3 Kabupaten Sumenep*)", skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Isoshum, 2012).

²⁰ Abdullah, "Membangun Citra Partai Politik Masa Depan (studi Deskriptif Strategi Humas Partai Persatuan Pembangunan Sleman DIY Dalam Membangun Citra)", skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Isoshum, 2011).

Ketiga, karya Abdul Hamid tentang Orientasi Dakwah Partai Politik Islam (Studi Analisis Orientasi Dakwah Partai Politik Berazaz Islam: DPW PPP di Yogyakarta).²¹ Pada karya ini secara objek penelitian sama yakni di DPW PPP Yogyakarta, tetapi secara fokus kajian tidak sama. Karya ini lebih fokus pada kajian tentang peran dakwah PPP terhadap masyarakat. Kemudian, secara narasi keilmuan lebih menekankan pada sebuah konsep asas Islam sebagai landasan untuk melakukan tindakan dakwah terhadap masyarakat. Oleh karenanya, secara normatif penelitian ini lebih menitiktekan pada prosesi dakwah yang dilakukan DPW PPP Yogyakarta di tengah masyarakat yang plural dan homogen.

Keempat, karya Ahmad Muhaimin tentang Hak-Hak Politik Perempuan Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan DI Yogyakarta.²² Pada penelitian ini yang dilakukan oleh penulis melihat dari aspek gender, yakni terkait hak-hak perempuan di dalam partai politik Islam. Secara objek kajian dalam penelitian ini sama, tetapi secara fokus kajian penelitian jauh dengan kajian penulis yang ada dalam penelitian ini. Jadi, secara normatif penelitiann karya Ahmad Muhaimin ini menyoroti tentang hak-hak perempuan dalam pandangan dewan pimpinan wilayah PPP Yogyakarta dan seluruh anggota partai dalam melihat hak perempuan.

²¹ Abdul Hamid, "Orientasi Dakwah Partai Politik Islam (Studi Analisis Orientasi Dakwah Partai Politik Berazaz Islam: DPW PPP DIJogyakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah, 2004).

²² Ahmad Muhaimin, "Hak-Hak Politik Perempuan Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan DI Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum, 2009).

Kelima, karya Joko Raharjo tentang Kontribusi Partai Politik Islam dalam Memperjuangkan Aspirasi Umat Islam (studi PPP Periode 1999-2009 di Kabupaten Klaten).²³ Karya ini lebih jauh menyoroti tentang partai politik terhadap aspirasi umat Islam dalam memperjuangkannya di parlemen. Kemudian, yang menjadi objek kajian peneliti adalah DPW PPP Yogyakarta, namun secara esensial tidak ada kesamaan dengan penelitian yang penulis kaji dalam penelitian ini. Karena fokus kajian yang diteliti oleh Joko Raharjo adalah perjuangan partai Islam dalam memperjuangkan aspirasinya di parlemen yakni di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keenam, karya Muhammad Saifudin tentang Kriteria Pemimpin dalam Partai Persatuan Pembangunan.²⁴ Karya ini membahas tentang prosesi pemilihan calon pemimpin di jajaran pusat sebagai alternatif kepemimpinan nasional dari perspektif kalangan pengurus dan kader PPP. Tetapi sejauh penulis amati dalam penelitian ini tidak ada substansi pemikiran yang sama dengan penelitian yang penulis kaji. Karena karya ini lebih fokus pada persiapan calon dan transformasi kepemimpinan di tingkat nasional. Sehingga fokus penelitian tidak ada kemiripan walaupun sejara objek penelitian sama.

Dalam penelusuran kepustakaan, sejauh penulis ketahui, belum ditemukan karya yang membahas sesuai dengan topik ini. Meskipun terdapat karya ilmiah baik buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi

²³ Joko Raharjo, "Kontribusi Partai Politik Islam dalam Memperjuangkan Aspirasi Umat Islam (studi PPP Periode 1999-2009 di Kabupaten Klaten)", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum, 2011).

²⁴ Muhammad Saifudin, "Kriteria Pemimpin dalam Partai Persatuan Pembangunan", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2009).

yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini. Oleh karena itu, sejauh ini yang membahas tentang penelitian terkait tidak ada yang terlalu signifikan kesamaannya. Namun, telah kami cantumkan seperti tertera di atas ada beberapa penelitian yang objeknya sama, tetapi subjek dan metode penelitian yang mereka gunakan tidak sama. Jadi secara keseluruhan dari hasil yang ditemukan tidak ada kesamaan dengan penelitian ini. Secara konseptual bahwa penelitian ini murni hasil sendiri bukan plagiarisme.

F. Landasan Teori

1. Tinjauan Tentang Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* pengaturan dilakukan melalui proses dan di atur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur. Maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita.²⁵

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.²⁶ Menurut Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber

²⁵ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, cetakan ke-9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 1.

²⁶ Sule. Ernie S, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 6.

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.²⁷ Richard L. Daft, mengartikan manajemen dengan pencapaian sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi.²⁸

Apa yang di atur? Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari *men, money, methods, materials, machines, and market*, disingkat menjadi 6M. *Kenapa harus di atur?* Agar 6M itu berdaya guna,berhasil guna,terintegrasi,dan terkordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. *Siapa yang mengatur?* Yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya melalui intruksi atau persuasi,sehingga 6M dan semua proses manajemen tertuju serta terarah pada tujuan yang diinginkan. *Bagaimana mengaturnya?* Mangturnya yaitu melauai proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian) *Dimana harus di atur?* Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena organisasi merupakan “alat” dan “wadah” untuk mengatur 6M dan semua aktifitas proses manajemen dalam mencapai tujuan.²⁹

b. Tujuan Manajemen

Pada dasarnya suatu aktifitas atau kegiatan selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini tujuan organisasi adalah

²⁷ Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*,... hal. 2.

²⁸ Richard L. Daft, *Manajemen*, Edisi Kelima, Jilid I... hal. 8.

²⁹ *Ibid*, hal.11.

mendapatkan laba (*business organization*), pelayanan dan pengabdian (*public organisation*) melalui proses manajemen itu. Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana (*plan*), karena itu hendaknya tujuan ditetapkan “jelas, realistis, dan cukup menantang” untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki. Jika tujuan jelas, realistis, dan cukup menantang maka usaha-usaha untuk mencapainya cukup besar. Sebaliknya, jika tujuan ditetapkan terlalu mudah atau terlalu muluk maka motivasi untuk mencapainya rendah.³⁰

c. Fungsi Manajemen

Menurut Richard L. Daft, terdapat 4 (empat) fungsi manajemen yaitu³¹ :

1. Perencanaan (*planning*), adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan penentuan tujuan yang ingin diraih oleh organisasi dan penetapan tugas-tugas dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Pengorganisasian (*organizing*), adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan penetapan dan pengelompokan tugas-tugas ke dalam departemen dan pengalokasian sumber daya ke berbagai departemen.

³⁰ *Ibid.*, hal. 17.

³¹ Richard L. Daft, *Manajemen*, Edisi Kelima, Jilid I, (Jakarta; Erlangga, 2002), hal. 8.

3. Kepemimpinan (*leading*), adalah fungsi manajemen yang melibatkan penggunaan pengaruh untuk memotivasi anggota meraih sasaran organisasi.
4. Pengendalian (*controlling*), yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemantauan aktivitas-aktivitas anggota, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran-sasarannya, dan membuat koreksi jika diperlukan.

Sementara itu, fungsi-fungsi manajemen dalam Islam seperti yang dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin adalah³²:

1. Perencanaan (*planning*), adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal.
2. Pengorganisasian, adalah kesungguhan dan keseriusan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi.
3. Kepemimpinan, pengertian pemimpin dalam Islam ada dua yaitu umara atau ulil amri (orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain) dan *khadimul ummah* (pelayan umat).
4. Pengawasan, dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.

³² Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2003), hal. 77.

2. Tinjauan Tentang Organisasi

a. Pengertian Organisasi

Istilah organisasi dalam bahasa Inggrisnya *Organization* yang berarti hal yang mengatur dan kata kerjanya *Organizing*, berasal dari bahasa latin *Organizare* yang mengatur atau menyusun.³³ Menurut Malayu S.P. Hasibuan, organisasi merupakan alat atau wadah tempat melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.³⁴ Pendapat lain yang dikemukakan para ahli, di antaranya adalah James D. Money yang mengartikan organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.³⁵ Rolp P. Davis mengungkapkan organisasi adalah sesuatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan.³⁶

Sedangkan Duright Waldo mengartikan organisasi sebagai struktur hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Organisasi menurut Chester L. Bernard adalah suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerja sama dari dua orang atau lebih sesuatu yang tidak berujud dan tak bersifat pribadi, sebagian besar mengenai hal hubungan.

Dalam pandangan Islam, organisasi merupakan suatu kebutuhan. Organisasi berarti kerja bersama. Organisasi tidak

³³ Achmad Mohyi, *Teori dan Perilaku Organisasi*, (Malang; UMM Press, 1999), hal. 1.

³⁴ Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2001), hal. 118.

³⁵ *Ibid.*, hal. 120.

³⁶ Achmad Mohyi, *Teori dan Perilaku Organisasi*, hal. 2.

diartikan semata-mata sebagai wadah. Pengertian organisasi itu ada dua, yaitu *pertama*, organisasi sebagai wadah atau tempat, dan *kedua*, pengertian organisasi sebagai proses yang dilakukan bersama, dengan landasan yang sama, tujuan yang sama, dan juga dengan cara yang sama.³⁷

Sebagaimana dasar anjuran berdirinya organisasi dalam firman Allah SWT:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.³⁸

Kemudian, dalam berorganisasi antara konsep (rencana) dan pelaksanaan haruslah sesuai. Hal ini tercantum dalam surat As shof ayat 4:

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*,... hal. 27.

³⁸ Q.S. Al-Imron 3: 104.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ
بَنِينَ مَرْصُوصًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.³⁹

Dalam ayat keempat surat tersebut disebutkan bahwa Allah SWT menyukai mukmin yang berjuang dalam sebuah bangunan yang kokoh. Ciri dari bangunan yang kokoh adalah seluruh komponen di dalamnya saling menguatkan satu dengan yang lain. Dapat dirinci, bahwa soliditas organisasi memiliki tiga ciri, yaitu: masing-masing komponen didalamnya bisa menguatkan satu dengan yang lain, bersinergi dalam bekerja serta memiliki program yang jelas, termasuk pembagian pelaksanaan program (pembagian potensi dan pemanfaatan kemampuan). Dalam hal ini, diperlukan adanya ketepatan di dalam penempatan orang. Siapa yang harus jadi tiang, jendela, atap, dan sebagainya.

b. Asas-Asas Organisasi

Untuk terwujudnya suatu organisasi yang baik, efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan, Malayu S.P. Hasibuan mengungkapkan bahwa secara selektif harus didasarkan pada asas-asas (prinsip-prinsip) organisasi sebagai berikut⁴⁰:

³⁹ Q.S As-Saff 61: 4.

⁴⁰ Hasibuan, Malayu S.P, *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*,... hal. 123.

Pertama, Asas tujuan organisasi (*Principle of organizational*). Tujuan organisasi harus jelas dan rasional, apa bertujuan untuk mendapatkan laba ataukah untuk memberikan pelayanan. *Kedua*, Asas kesatuan tujuan (*Principle of unity of objective*). Di dalam suatu organisasi harus ada kesatuan tujuan yang ingin dicapai karena jika tidak organisasi akan kacau. *Ketiga*, Asas kesatuan perintah (*Principle of unity of command*). Hendaknya setiap bawahan menerima perintah ataupun memberikan pertanggung jawaban hanya kepada satu orang atasan, tetapi seorang atasan dapat memerintah beberapa orang bawahan. *Keempat*, Asas rentang kendali (*Principle of the span of management*). Menurut asas ini, seorang manajer hanya dapat memimpin secara efektif sejumlah bawahan tertentu, misalnya 3 sampai 9 orang. Jumlah bawahan ini tergantung kecakapan manajer tersebut. *Kelima*, Asas pendelegasian wewenang (*Principle of delegation of authority*). Hendaknya pendelegasian wewenang dari seorang atau sekelompok orang kepada orang lain jelas dan efektif, sehingga ia mengetahui wewenangnya. *Keenam*, Asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab (*Principle of parity of authority and responsibility*). Hendaknya wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Hendaknya wewenang yang didelegasikan tidak meminta pertanggung jawaban yang lebih besar dari wewenang itu sendiri

atau sebaliknya. *Ketujuh*, Asas tanggung jawab (*Principle of responsibility*) Hendaknya pertanggung jawaban dari bawahan terhadap atasan harus sesuai dengan garis wewenang (*line authority*) dan pelimpahan wewenang. Seseorang hanya bertanggung jawab terhadap orang yang melimpahkan wewenang tersebut. *Kedelapan*, Asas pembagian kerja (*Principle of departmentation*). Menurut asas ini, pengelompokan tugas, pekerjaan, atau kegiatan yang sama ke dalam satu unit kerja (departemen) hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut. *Kesembilan*, Asas penempatan personalia (*Principle of personel placement*). Hendaknya penempatan orang-orang pada setiap jabatan harus didasarkan atas kecakapan, keahlian, dan keterampilannya (*the right man in the right job*). *Kesepuluh*, Asas jenjang berangkai (*Principle of scolar chain*) Hendaknya saluran perintah atau wewenang dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas dan tidak terputus-putus serta menempuh jarak terpendek. *Kesebelas*, Asas efisiensi (*Principle of eficiency*). Suatu organisasi dalam mencapai tujuannya harus dapat mencapai hasil yang optimal dengan pengorbanan yang minimal. *Keduabelas*, Asas koordinasi (*Principle of coordination*) Koordinasi dimaksudkan untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan segala tindakan supaya terarah kepada sasaran yang ingin dicapai.

c. Proses Manajemen Organisasi

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dan mengikat kesatuan suatu organisasi. Komunikasi membantu anggota organisasi mencapai tujuan individu dan organisasi, merespon dan mengimplementasikan perubahan organisasi, mengkoordinasikan aktifitas organisasi dan ikut memainkan peran dalam hampir semua tindakan organisasi. Para ahli komunikasi menyatakan bahwa komunikasi yang efektif adalah “pemahaman bersama antara orang yang menyampaikan pesan dan orang yang menerima pesan”. Fakta yang ada menunjukkan bahwa kata *komunikasi* dari bahasa latin *communis* yang artinya “bersama.” Jadi, komunikator berusaha mencari kebersamaan dengan si penerima pesan.⁴¹

Berikut adalah macam-macam komunikasi dalam organisasi⁴²:

- a. *Komunikasi Ke bawah*, merupakan komunikasi yang mengalir dari individu yang berada pada kedudukan yang lebih tinggi kepada mereka yang berada pada kedudukan lebih rendah.

⁴¹ John M. Ivancevich. dkk, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jilid ke dua, Edisi ke - 7, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 115-116.

⁴² *Ibid.*, hal. 121-122.

- b. *Komunikasi Ke atas*, merupakan komunikasi yang mengalir pada individu dari yang lebih rendah dalam struktur organisasi kepada mereka yang berada di kedudukan lebih tinggi. Bentuk komunikasi ke atas yang sering kita jumpai adalah kotak saran, rapat-rapat kelompok dan protes.
- c. *Komunikasi Horizontal*, merupakan komunikasi yang terjadi lintas fungsi yang berbeda-beda dalam sebuah organisasi. Salah satu contohnya adalah komunikasi antara berbagai jurusan dalam sebuah fakultas demi terwujudnya koordinasi dan integrasi dari berbagai fungsi organisasi yang beragam.
- d. *Komunikasi Dengan Pihak Luar*, merupakan komunikasi yang dilakukan untuk mempresentasikan produk atau layanan, untuk menampilkan citra organisasi yang positif agar mendapatkan simpati atau menarik hati masyarakat sebanyak-banyaknya. Berikut ini jenis komunikasi external.
- e. *Hubungan Masyarakat, Periklanan, Promosi, Survei Konsumen.*

2. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting dan dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan, dalam banyak kasus suatu organisasi hancur karena keliru dalam mengambil satu

keputusan dalam individu, kelompok atau organisasi. Berikut ini jenis-jenis keputusan⁴³:

- a. Keputusan *terprogram* merupakan situasi dimana prosedur spesifik telah di tentukan untuk masalah berulang atau rutin (Setiap langkah sudah ditetapkan untuk merespon atau menghadapi suatu problem dengan prosedur yang sudah ditetapkan).
- b. Keputusan *tidak terprogram*, merupakan keputusan yang diperlukan untuk masalah manajemen yang unik dan kompleks (Tidak ada prosedur yang pasti dalam menangani masalah, baik karena belum pernah ditemukan situasi yang sama sebelumnya, atau karena bersifat sangat kompleks atau sangat penting).

Berikut proses pengambilan keputusan⁴⁴:

- a. *Menetapkan Tujuan Dan Target*, dengan adanya target dan tujuan yang jelas, maka dapat ditentukan hasil yang seperti apa yang harus dicapai dan indicator untuk mengukur pencapaian tersebut.
- b. *Identifikasi dan Definisi Masalah*, Kondisi yang memicu perlunya sebuah keputusan adalah adanya masalah, jika tidak ada masalah tidak perlu di ambil sebuah keputusan.

⁴³ *Ibid.*, hal. 158-159.

⁴⁴ Herbert A Simon, *The New Science of Management Decision*, (New York: Harper and Row, 1960), hal. 5-6.

Biasanya masalah timbul karena adanya kesenjangan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan sebenarnya.

- c. *Penetapan* , mengambil keputusan apakah akan merespon dan menetapkan proritas untuk masalah-masalah yang ada (menetapkan tingkat signifikansi dari sebuah masalah yang dihadapi).
- d. *Mengetahui Penyebab Masalah*, meskipun bukan tidak mungkin, biasanya akan sangat sulit dan tidak dahulu menentukan solusi sebelum mengetahui penyebab dari masalah tersebut.
- e. *Mencari Solusi Alternatif*, sebelum sebuah keputusan di ambil, beberapa alternative yang harus dikembangkan (hal ini merupakan solusi potensial terhadap masalah) dan konsekuensi dari semua alternative harus diperhitungkan dengan matang.
- f. *Evaluasi Terhadap Seluruh Alternatif*, setelah semua alternatif dikembangkan, maka harus di evaluasi dan dibandingkan, sehingga dapat mengetahui kepastian, ketidakpastian dan resiko.
- g. *Memilih Solusi*, menetapkan solusi-solusi yang ada untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Poin pentingnya adalah pengambilan keputusan bukan saja sebuah tindakan memilih, tetapi merupakan sebuah proses yang dinamis.

- h. *Implementasi*, setiap keputusan akan bersifat abstrak jika tidak di implementasikan, harus di implementasikan dengan efektif. Akan sangat mungkin sebuah keputusan yang baik dirusak oleh implementasi yang buruk.
- i. *Tindak Lanjut*, hasil yang dicapai dibandingkan dengan hasil yang direncanakan (tujuan), dan jika ada perbedaan harus dilakukan perubahan. Jika hasil yang sebenarnya tidak sesuai dengan hasil yang direncanakan, harus dilakukan perubahan terhadap solusi yang dipilih, implementasinya, atau mungkin penilaian apakah memang tujuan awal merupakan suatu yang tidak realistis.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah posisi yang memberikan pengaruh dalam lingkup atau situasi organisasi, untuk menghasilkan efek yang signifikan dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan individu dan kelompok. Seperti yang dinyatakan oleh para peneliti organisasi bahwa “Tidak ada tim yang sukses tanpa adanya kepemimpinan” pemimpin tim seringkali muncul dengan sendirinya atau kadang ditunjuk. Pemimpin disini kadang disebut koordinator, fasilitator, atau pelatih. Mereka memiliki pengaruh

yang bersumber dari posisi atau keahlian yang di akui anggota tim yang lain.⁴⁵

Berikut jenis kepemimpinan⁴⁶:

- a. *Kepemimpinan karismatik*, merupakan pemimpin yang dapat mewujudkan atmosfer motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi dan gaya mereka dalam diri bawahannya. Karisma di anggap sebagai kombinasi dari pesona dan daya tarik pribadi yang berkontribusi terhadap kemampuan luar biasa untuk membuat orang lain mendukung visi dengan baik.
- b. *Kepemimpinan Transaksional*, merupakan kepemimpinan yang membantu bawahan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk meraih hasil (output lebih berkualitas, penjualan atau jasa lebih, pengurangan biaya anggaran) dan memastikan bawahan memiliki sumber daya yang kompeten dan dapat dipertanggung jawabkan.
- c. *Kepemimpinan Transformasional*, pemimpin yang dapat memotivasi bawahan ketimbang keinginan jangka pendek serta pencapaian dan aktualisasi diri ketimbang kesejahteraan; mampu mengekspresikan visi yang jelas dan menginspirasi orang lain.

⁴⁵ Daniel Goleman, *Leadership That Gets Results*, *Harvard Business Review*, March-April 2000, hal. 78-90.

⁴⁶ John M. Ivancevich. Dkk, *Perilaku dan Manajemen Organisasi* Jilid ke-2, Edisi ke - 7,... hal. 209-213.

3. Tinjauan Tentang Partai Politik

a. Definisi Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik. Sebagai suatu organisasi yang khas, partai politik dilihat sebagai suatu bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain. Partai politik dilihat sebagai “*autonomous groups that make nominations and contest elections in the hope of eventually gaining and exercise control of the personnel and policies of government*”. Dalam konteks ini mereka melihat bahwa tujuan utama didirikannya partai politik adalah mendapatkan kekuasaan dan melakukan kontrol kebijakan publik. Selain itu partai politik diharapkan independen dari pengaruh pemerintah. Hal ini tentunya menyiratkan tujuan agar partai politik bisa mengkritisi setiap kebijakan dan tidak tergantung pada pemerintah yang dikritisi.⁴⁷

b. Fungsi Partai Politik

Secara garis besar, fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. *Kedua*, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi. Disini peran dan fungsi partai politik terkait

⁴⁷ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hal. 66-67.

dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.⁴⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber data⁴⁹ termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*).⁵⁰ Ditinjau dari segi sifat-sifat data maka termasuk dalam penelitian kualitatif.⁵¹ Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini berusaha mengungkap serta menjawab dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini, semua karakteristik dari variabel yang diteliti dideskripsikan sebagaimana adanya tanpa ada perlakuan atau pengendalian secara khusus. Substantif penelitian seperti ini pada dasarnya adalah fenomena tentang dunia makna sehingga datanya bersifat kualitatif dengan latar alamiah.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 69-70.

⁴⁹ Data berasal dari bahasa latin, yang merupakan bentuk jamak dari kata 'datun', yang berarti keterangan-keterangan suatu fakta. Talizuduhu Ndraha, *Reseach, Teori, Metodologi, Administrasi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hal. 76.

⁵⁰ Penelitian lapangan adalah untuk mencari dimana peristiwa-persitiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapat informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus sebagai cros checking terhadap bahan-bahan yang telah ada. *Ibid.*, hal. 116.

⁵¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak (peneliti dan subjek penelitian). Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 27.

2. Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian ini ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵² Data inti dari penelitian ini adalah dokumen-dokumen, hasil catatan wawancara dan observasi dilapangan, foto-foto dan data statistik jika diperlukan. Maka data primer dalam penelitian ini adalah manajemen organisasi partai politik DPW PPP Yogyakarta dengan mengambil 3 informan dari masing-masing elemen pengurus DPW PPP Yogyakarta, yang terdiri dari ketua DPW PPP, Sekjen DPW PPP, dan 1 orang ketua pemenang pemilu (LP2) 2014 DPW PPP. Pemilihan sumber data ini berdasarkan asumsi bahwa orang-orang tersebut mempunyai bergaening posisi di pengurusan partai. Kemudian, mereka adalah yang mempunyai kebijakan strategis dalam menyusun rencana kemenangan pemilu 2014, dan pengorganisasian manajemen partai. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber-sumber data lain untuk melengkapi data penelitian, maka diperlukan adanya sumber-sumber untuk melengkapi data penelitian sesuai dengan judul peneliti tentang manajemen organisasi partai politik DPW PPP Yogyakarta yakni dengan buku-buku referensi, laporan atau jurnal, koran dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Prosedur Pengumpulan Data

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi, hal. 157.

Dalam usaha pengumpulan data yang dianggap relevan dengan objek penelitian maka diperlukan adanya metode pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi Partisipatif

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi dua yaitu observasi berperan serta dan nonpartisipan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipan dan terstruktur, artinya peneliti terlibat dalam kegiatan yang diteliti. Observasi partisipan ini tidak akan mendapat data yang mendalam, dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terungkap dan yang tertulis. Terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.⁵³

Dalam observasi ini peneliti mengamati dan mendeskripsikan fakta secara cermat, dan terperinci mengenai bagaimana prosesi persiapan pemilu 2014 untuk penemenangan partai di pemilu legislatif, baik dari persiapan secara fisik dan

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.145-146.

materil. Semenjak penelitian ini di mulai dan sampai selesai penelitian.

b. Metode Interview

Metode interview merupakan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan secara bebas, tetapi terarah dengan tetap berada pada jalur pokok permasalahan yang telah disiapkan terlebih dahulu.⁵⁴ Interview atau wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan pedoman interview yang telah disiapkan secara lengkap dan cermat, dengan suasana tidak formal. Dalam wawancara jenis ini lebih harmonis dan tidak kaku.⁵⁵

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi⁵⁶ adalah peneliti berproses dan berawal dari menghimpun dokumen⁵⁷, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian ditelaah dan dicatat serta ditafsirkan. Selain itu metode dokumentasi bisa diartikan sebagai

⁵⁴ Rahmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 99.

⁵⁵ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), hal. 33-34.

⁵⁶ Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabat, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 206.

⁵⁷ Dokumen adalah bahan tertulis yang berupa buku, surat kabar, majalah, transkrip, dan sebagainya. Iman Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 164.

metode pengumpulan data melalui dokumen sebagai sumber data.⁵⁸ Dokumen yang bisa digunakan bisa berupa *otobiografi*, catatan harian, berita Koran atau surat kabar, artikel majalah, foto-foto dan lain-lain.⁵⁹

Menurut Onong yang termasuk dalam dokumentasi ada tiga hal, yakni *pertama*, sistem pengklasifikasian dokumen, pengklasifikasian dokumen sendiri dapat dibagi menjadi dua kronologis (dicatat secara berurutan) dan sistematis (diklasifikasikan sesuai topik). *Kedua*, pelengkapan data dengan dokumen dan *ketiga*, penggunaan dokumen tersebut sebagai sumber data.⁶⁰ Metode dokumentasi dalam penelitian ini merupakan sumber data primer untuk memperoleh data mengenai profil DPW PPP Yogyakarta kepengurusan periode 2010-2015.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis interaktif yang dikemukakan oleh Huberman & Miles terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶¹ Adapun penjelasan lebih rinci sebagai berikut :

- a. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

⁵⁸ Onong Uchayha Efendi, *Kamus Istilah Komunikasi*, (Bandung: Mandar Maju,1989), hal. 104.

⁵⁹ Deddi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2004) hal. 195.

⁶⁰ Onong Uchayha Efendi, *Kamus Istilah Komunikasi*, hal.104.

⁶¹ M. Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 150-152.

muncul dari catatan-catatan di lapangan. Proses ini merupakan sebuah proses yang berulang selama proses penelitian kualitatif berlangsung. Karena tujuan dilakukannya proses ini adalah untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan serta mengorganisasi data. Maka hal tersebut dapat memudahkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan.

- b. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui hal tersebut, peneliti akan lebih memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
- c. Penarikan kesimpulan adalah dimulai dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Hal tersebut merupakan langkah terakhir dari analisis data penelitian kualitatif.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif oleh Bogdan dan Biklen didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pendekatan ini terutama digunakan untuk memperoleh pemahaman (*insight*) yang menyeluruh dan tuntas mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian.

Pada tahap analisis data, peneliti melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif pada interpretasi data yang telah diperoleh, tujuannya agar data yang diperoleh valid dan reliabel. Reliabilitas prosedur penelitian kualitatif diupayakan melalui beberapa cara antara lain sesuai dengan pendapat Nasution, yaitu: (a) melakukan pencatatan dan dokumentasi data secara teliti dan terbuka, dan (b) transparansi mengenai prosedur di lapangan dan hal-hal yang diungkap serta (c) membandingkan hal-hal yang dicapai melalui metode wawancara dan observasi, serta cek dan ricek kepada para subyek.

Pada penelitian kualitatif untuk membuktikan validitas data dikenal dengan istilah kredibilitas. Fungsi dari kredibilitas adalah melaksanakan inkuiri secara mendalam sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai, menunjukkan derajat kepercayaan dari hasil-hasil penemuan.⁶² Terkait hal tersebut teknik yang digunakan untuk pemeriksaan atau pembuktian kredibilitas adalah sebagai berikut :

a. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data.

Adapun keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam waktu

⁶² Lexy J. Moleong, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi,... hal. 326.

singkat, melainkan harus memerlukan perpanjangan waktu. Hal ini, berdasarkan dari latar belakang penelitian sampai menemukan titik kejenuhan agar pengumpulan data tercapai.

b. Ketekunan dalam pengamatan

Ketekunan dalam pengamatan merupakan mencari sesuatu secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara terkait proses analisis. Adapun tujuan dilakukan ketekunan adalah untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur sesuai situasi yang sangat relevan terkait dengan permasalahan yang sedang dicari, kemudian fokuskan secara rinci.

H. Sistematika Pembahasan

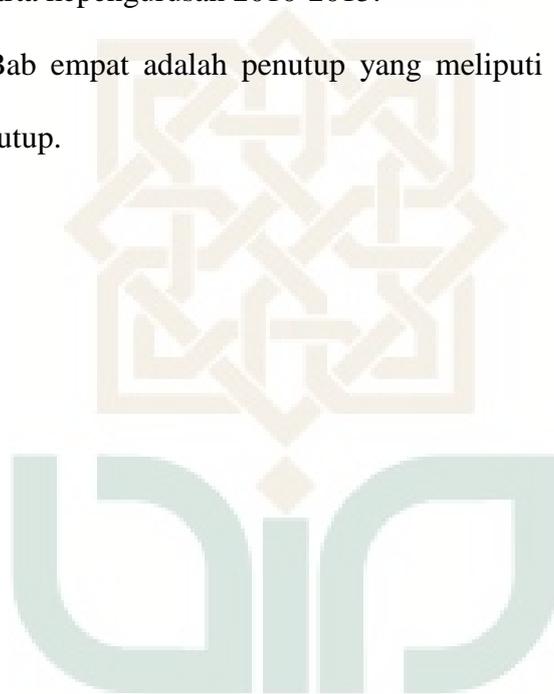
Agar dalam penelitian ini sistematis, terukur dan mengarah pada hasil penelitian, maka peneliti perlu merencana sistematika pembahasan selanjutnya. Maka dari itu peneliti akan menjelaskan per bab dalam penelitian ini, antara lain:

Pada bab satu peneliti mencantumkan penegasan judul, latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, dan metode penelitian. Kemudian dilanjutkan pada bab berikutnya yaitu bab dua membahas tentang gambaran umum penelitian, yang terdiri atas profil DPW PPP Yogyakarta kepengurusan 2010-2015, profil informan yang menjadi key informasi dalam penelitian, persiapan pemenangan pemilu DPW PPP Yogyakarta 2014, dan calon anggota

legislatif yang diusung oleh DPW untuk DPRD tingkat propinsi dan calon DPR RI.

Selanjutnya bab tiga yang menjadi inti dalam proses penelitian ini. Dimana pada bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil proses lapangan dan analisis terhadap penelitian persiapan pemilu legislatif 2014 di DPW PPP Daerah Istimewa Yogyakarta kepengurusan 2010-2015.

Bab empat adalah penutup yang meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tentang manajemen organisasi partai politik di PPP kebijakan strategis wilayah Yogyakarta itu adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana hasil mukhtamar yang dilaksanakan oleh DPP PPP, kebijakan strategis partai berbuah hasil pada implementasi kebijakan yang ada di daerah atau wilayah. Sehingga saat ini berjalannya roda organisasi yang ada di PPP telah diputuskan melalui kebijakan-kebijakan partai yang ada di pusat. Adapun kebijakan tersebut adalah dengan mempertegas arah kemenangan pemilu pada tahun 2014, menentukan kebijakan-kebijakan kemenangan partai dan implementasi hasil mukhtamar.
2. Kebijakan strategis PPP dapat dilihat dalam enam aspek yang menjadi kajian utama untuk perubahan, yakni dalam perspektif agama, politik, ekonomi, hukum dan HAM, sosial-kemasyarakatan dan budaya, kesejahteraan masyarakat dan hubungan internasional.
3. Manajemen organisasi partai politik di PPP dalam persiapan kemenangan pemilu 2014 adalah konsolidasi dan penguatan fungsi organisasi, membangun citra partai, pemberdayaan kaum perempuan, pengembangan jaringan berbasis konstituen, mobilisasi

sumber dana (*fundraising*), kemudian, dalam membangun citra partai untuk pemenangan pemilu mempunyai strategis sebagai berikut; penguatan fungsi kelembagaan, menentukan prioritas program, ideologisasi dalam gerakan partai, silaturahmi sebagai modal gerakan, kepemimpinan dan pola pengendalian pelaksanaan program, dan kerjasama dengan kelompok-kelompok strategis.

4. Dalam proses pemilu 2014, PPP mengimplementasikan hasil mukhtamar dengan program pemenangan pemilu diantaranya adalah perencanaan dan kegiatan dalam mengawal pemilu, dari seluruh wilayah di Indonesia melakukan pemetaan yang konsisten pada konstituen, agar lebih mengena pada masyarakat maka partai melakukan sosialisasi program yang diusung dan menjadi andalan dalam partai, pengelolaan kampanye dengan media dan jejaring sosial sebagai basis pencitraan partai, pengawalan pemungutan suara di setiap TPS di daerah, serta pemungutan dan pengawalan hasil pemungutan suara.

B. Saran

Saran yang bisa disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sehingga hasil yang diharapkan bisa terwujud dan terukur.

2. Untuk objek penelitian diharapkan penelitian selanjutnya lebih luas dan mencakup semua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tersebar di semua daerah-daerah di Indonesia. Sehingga bisa betul-betul dijadikan rujukan dan bahan perbaikan yang konstruktif bagi masa depan partai itu sendiri.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan rahmat dan petunjuknya kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas penelitian ini dari awal hingga akhir. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi peneliti bahwa pada akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Bagaimanapun, di merasa telah belajar banyak dari pengalaman selama proses penyelesaian penyusunan skripsi ini, yang tentu saja akan sangat bermamfaat bagi perkembangan kehidupan intelektual di masa depan.

Skripsi ini merupakan hasil optimal yang dapat peneliti usahakan, dan telah mencurahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan yang terbaik. Sungguhpun demikian, tak ada gading yang tak retak, bahwa menyadari tidak ada yang sempurna dalam kerja yang manusiawi. Hal ini terlebih lagi berlaku untuk skripsi ini, yang di tulis oleh seorang dalam proses berlatih. Karena itu, mengharapkan kritik dan saran yang

konstruktif dari berbagai pihak atas aspek-aspek teknis maupun substansi isi skripsi ini.

Akhirnya, sekali mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah turut membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi ini. Peneliti ingin menegaskan bahwa skripsi ini merupakan kenangan terakhir bagi almamater tercinta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun pada akhirnya harus meninggalkan almamater tercinta ini dan semua orang-orang yang pernah menjadi guru dan sahabat. Namun semuanya akan tetap hidup dalam kenangan untuk selamanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, "Orientasi Dakwah Partai Politik Islam (Studi Analisis Orientasi Dakwah Partai Politik Berazaz Islam: DPW PPP DIJogjakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah, 2004).
- Abdullah, "Membangun Citra Partai Politik Masa Depan (studi Deskriptif Strategi Humas Partai Persatuan Pembangunan Sleman DIY Dalam Membangun Citra)", *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Isoshum, 2011).
- Achmad Mohyi, *Teori dan Perilaku Organisasi*, (Malang; UMM Press, 1999).
- Ahmad Muhaimin, "Hak-Hak Politik Perempuan Pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan DI Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum, 2009).
- Asshiddiqie, Jimly, (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara – Jilid II, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara – Jilid II*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).
- Bahrul Huda, "Strategi Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Pemilu Legislatif 2009 Melalui Pendekatan Sosio-ekonomi Kerakyatan (Studi Pemenangan Ahmad Salim Di Dapil 3 Kabupaten Sumenep)", *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Isoshum, 2012).
- Deddi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).
- Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2003).
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2008).

- Fremont E.Kast & James E.Rosenzweig, *Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara 1995).
- Fremont E.Kast & James E.Rosenzweig, *Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara 1995).
- G.R. Terry, *Principles of Management*, Winardi, pent. (Bandung: Alumni, 1986).
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Joko Raharjo, "Kontribusi Partai Politik Islam dalam Memperjuangkan Aspirasi Umat Islam (studi PPP Periode 1999-2009 di Kabupaten Klaten)", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum, 2011).
- Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, (New York : Harper), 1947.
- Ketetapan Muhtamar VI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentang Khittah dan Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan, dalam www.ppp.or, tahun 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010).
- M. Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, cetakan ke-9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Mochtar Mas'ood, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Muhammad Saifudin, " Kriteria Pemimpin dalam Partai Persatuan Pembangunan", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2009).
- Muhtar Efendy, *Manajemen Islam* (Jakarta: Batara Karya Aksara, 1986).
- Onong Uchaya Efendi, *Kamus Istilah Komunikasi*, (Bandung: Mandar Maju, 1989).

- Rahmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Richard L. Daft, *Manajemen, Edisi Kelima, Jilid I*, (Jakarta; Erlangga, 2002).
- Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992).
- Samego Indria , *Book Review Ekonomi Politik, Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta, 2000.*
- Samuel.P.Huntington, dan Nelson, Joan. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989)
- Sondang P.Siaglan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara 1993).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. 12*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
- Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003).
- Syamsuddin Haris. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988).
- Talizuduhu Ndraha, *Reseach, Teori, Metodologi, Administrasi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981).

1. Namalengkap : HM. Syukri Fadholi, SH.
2. Tempat/tanggallahir/Umur : Yogyakarta/ 23 September 1951 / 62 tahun
3. JenisKelamin : Laki-laki/~~Perempuan~~*)
4. Agama : Islam
5. Status Perkawinan : Kawin/~~pernahkawin/belumkawin~~
6. AlamatTempatTinggal : Suronatan NG II/854
RT/sebutan lain : 0 5 1
RW/sebutan lain: 008
Kelurahan/~~Desa~~*) :Notoprajan
Kecamatan/~~Distrik~~ :Ngampilan
~~Kabupaten~~/Kota :Y o g y a k a r t a
Provinsi :Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Riwayatpendidikan **) : a. SD Muhammadiyah Purwodiningratan (1964)
b. SMP N 3 Yogyakarta (1967)
c. SMA Muhammadiyah I Yogyakarta (1970)
d. Universitas Islam Indonesia (1977)
8. Kursus/Diklatyangpernahdiikuti: -
9. Riwayat organisasi***)
 - a. Ketua Pemuda Muhammadiyah Ranting Suronatan (1970-1975)
 - b. Ketua Pemuda Muhammadiyah DIY (1979-1984)
 - c. Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (1984-1989)
 - d. Sekretaris DPC PPP Kotamadya Yogyakarta (1984-1989)
 - e. Ketua BPK Muhammadiyah Daerah Yogyakarta (1985-1990)
 - f. Wakil Ketua Ikatan Pencak Silat DIY (1985-1990)
 - g. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah (1989-1993)
 - h. Ketua DPC PPP Kotamadya Yogyakarta (1989-1999)
 - i. Anggota BPK Muhammadiyah Daerah Yogyakarta (1995-2000)
 - j. Wakil Ketua Persaudaraan Setia Hati Mataram (1998-2003)
 - k. Ketua Yayasan Alumni SMA Muhammadiyah I Yogyakarta (1999-2004)
 - l. Wakil Ketua DPW PPP DIY (1999-2004)
 - m. Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY (2001-2006)
 - n. Ketua DPW PPP DIY (2004-2010)
 - o. Ketua DPW PPP DIY (2011-2016)
10. Riwayat Pekerjaan :
 - a. Pengacara/Penasehat Hukum (1977-1984)
 - b. Pengajar SMA Muhammadiyah I Yogyakarta (1979-201)
 - c. Dosen Fakultas Hukum UMY (1984-1992)
 - d. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UMY (1986-1990)
 - e. Pimpinan SMA Muhammadiyah I Yogyakarta (1987-1998)
 - f. Pimpinan DPRD Kotamadya Yogyakarta (1987-1999)
 - g. Anggota DPRD Propinsi DIY (1999-2001)
 - h. Wakil Walikota Yogyakarta (2001-2006)

Kode: W1

NO.	Hasil Wawancara	Reduksi Kata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	<p data-bbox="400 412 1062 479">Apakah anda tahu tentang program DPW PPP Yogyakarta kepengurusan 2010-2015</p> <p data-bbox="400 486 1062 734">Barang tentu saya tau.. karna saya sebagai ketua DPW, adalah penanggung jawab kegiatan DPW PPP se-DIY secara terencana,terukur dan terkonsolidasi. Oleh karena itu saya memahami persis bagaimana strategi yang diperlukan dalam rangka memenangkan pemilu yang akan datang.</p> <p data-bbox="400 741 1062 808">Bagaimana implementasi program tersebut terhadap perjalanan organisasi partai?</p> <p data-bbox="400 815 1062 1429">Ada kebijakan-kebijakan yang diputuskan dalam muswil yang dilaksanakan beberapa tahun lalu yang merupakan prinsip dasar kebijakan dlm angka melaksanakan pemilu itu sendiri. Yang kedua keputusan muktamar di bandung yg juga memberikan garis2 besar mengenai pemilu yg akan datang, program yg mendasar yg telah digariskan oleh DPP dan DPW kemudian dijabarkan dalam rakernas maupun rakerwil yang pada ujungnya melahirkan program2 strategis dlm rangka persiapan pemilu 2014 mendatang. Yang ke tiga Dari kebijakan2 yang telah dirumuskan oleh rakernas dan rakerwil ,kemudian di brakdownnd di dalam tugas-tugas LP2 tingkat DIY maupun tingkat 2 se-DIY.</p> <p data-bbox="400 1435 1062 1547">Apakah dari implementasi program tersebut dapat berpengaruh pada pola roda organisasi partai?</p> <p data-bbox="400 1554 1062 1877">Dipastikan bahwa program2 kebijakan partai yang perlu dirumuskan dan di aplikasikan LP2 itu pasti berpengaruh pada roda organisasi serta roda kegiatan LP2 itu sendiri karna apa? Program ini memberikan geident yang jelas,tegas,terencana dan terukur agar LP2 sebagai ujung tombak pemenangan pemilu mampu bekerja dengan baik sesuai dengan yg direncanakan.</p> <p data-bbox="400 1883 1062 1951">Bagaimana saat ini pola organisasi berjalan?</p> <p data-bbox="400 1957 1062 1984">Pola yang kita laksanakan adalah ada 2 sisi</p>	

45	kegiatan yang menonjol yang pertama	
46	adalah mesin organisasi partai dari tingkat	
47	wilayah,tingkat cabang,tingkat anak cabang	
48	dan anak ranting sejalan dan terintegrasi	
49	sebagai jaminan bahwa kebijakan2 hasil	
50	rakernas dan rakerwil itu bisa berjalan	
51	dengan maksimal.	
52	Apakah pola organisasi yang diterapkan di	
53	DPW PPP Yogyakarta telah sesuai dengan	
54	teori manajemen?	
55	Saya melihat di dalam garis besar secara	
56	gradual maka konsep yg kita laksanakan ini	
57	sesuai teori manajemen organisasi dlm	
58	rangka melaksanakan kegiatan yg dilakukan,	
59	betaapun saya katakana tidak sempurna, krena	
60	keterbatasan SDM dan anggaran yang	
61	dimiliki, jadi dua sisi ini menjadi hambatan	
62	yg pada ujungnya program ini jadi tidak	
63	maksimal.	
64	Bagaimana manajemen organisasi partai	
65	anda dalam persiapan pemilu legislative pada	
66	2014 mendatang?	
67	Program dan manajemen partai yang kita	
68	lakukan selama ini sudah disesuaikan dengan	
69	kaidah-kaidah yang di atur oleh ADART	
70	maupun kebijakan2 partai yg perlu di	
71	tunaikan, misalnya dalam rangka	
72	pemenangan pemilu maka garis besar	
73	program yg telah ditetapkan menjadi acuan	
74	dasar kebijakan umum menjadi pijakan	
75	kegiatan partai. Yang kedua landasan	
76	operasional yg perlu dilakukan sudah	
77	dirumuskan dalam keputusan muswil-	
78	rakerwil yang kemudian di implementasikan	
79	dalam raker LP2 se-DIY yang melibatkan	
80	semua unsur partai.	
81	Sejauh mana anda terlibat dalam proses	
82	persiapan tersebut?	
83		
84	Sebagai ketua partai maka didalam kaidah	
85	organisasi, ketua partai ini menjadi penanggung	
86	jawab kegiatan jadi barang tentu mendesain	
87	program2 itu melibatkan ketua sebagai	
88	penjab yg kemudian ketua memberikan	
89	geident tentang kebijakan umum yg harus	
90	dilakukan dan kebijakan khusus sebagai	

91	strategi pemenangan itu sendiri, dari awal	
92	sampe akhir tetap menjadi panauan ketua	
93	DPW.	
94	Siapa saja yang didelegasikan untuk mewakili	
95	partai pada pemilu legislatif di pemilu 2014	
96	mendatang, baik DPR RI ataupun DPRD?	
97	Program partai ini memang di atur dalam	
98	AD/ART partai yang tentunya wakil ketua	
99	yag membidangi X pemilu bertanggung	
100	jawab penuh dalam pemilu legislative saat	
101	ini. Kemudian yang kedua, delegasi itu	
102	berlanjut tika kemudian wakil ketua LP2	
103	membrekdow Terhadap buah pengurus	
104	yang lainnya lp2. Struktur organisasi	
105	mengatur bahwa secara berjenjang ketua	
106	DPW bs mendelegasikan kepada wakil ketua	
107	dan wakil yang membidangi ataupun	
108	organisasi yang membidangi pemilu itu	
109	sendiri.	
110	Sejauh ini bagaimana pola koordinasi	
111	terhadap DPC DPW PPP Yogyakarta yang	
112	anda amati?	
113	DPW telah menggariskan bahwa program	
114	kegiatan pemilu itu sangat tidak mungkin	
115	berjalan ketika koordinasi tidak dilakukan,	
116	oleh karena ini koordinasi secara berjenjang	
117	maupun koordinasi secara periodic antara	
118	DPW dengan DPC, Antara DPW,DPC dan	
119	PAC sekaligus DPW,DPC,PAC dan ranting.	
120	Yang kedua, LP2 wajib melakukan	
121	koordinasi LP2 tingkat 1 dan tingkat 2	
122	kemudian kepada PAC dan ranting	
123	merupakan matarantai yang harus	
124	dilaksanakan. Yang ketiga, bahwa wakil	
125	ketua yang membidangi organisasi serta	
126	pemuda dan wanita wajib	
127	mengkoordinasikan pada lembaga-lembaga	
128	yang ada misalnya.. bagian kewanitaan	
129	kepemudaan tingakat 1,2 dan tingkat ranting.	
130	Jadi harus dipastikan bahwa koordinasi dan	
131	kegiatan tersebut harus sampai di bawah.	
132	Apakah anda mengamati proses koordinasi	
133	tersebut sudah sesuai dengan pola	
134	manajemen secara konsep teoritis?	
135	Dalam rapat rutin mingguan setidaknya LP2	
136	berkewajiban melaporkan pada DPW tentang	

137	prongram yang harus dilaksanakan secara	
138	berjenjang, terkordinasi dan terukur. Itu	
139	sebagai dasar sebagai bahan evaluasi, sejauh	
140	manakah kebijakan2 partai itu sesuai	
141	perencanaan? oleh karena itu wajib	
142	melaporkan bagi LP2 kepada DPW satu kali	
143	dalam satu minggu.	
144	Sejauh mana anda mengetahui terhadap	
145	koordinasi tersebut?	
146	Koordinasi yang dilaksankan memang sesuai	
147	kaidah2 yang ter cantum di ADART, tetapi	
148	DPW mengambil kebijakan yang agak	
149	luwes.. artinya kalo garis organisasi belum	
150	berjalan maksimal maka pendekatan2 secara	
151	personal kepada pimpinan2 dibawah itu pasti	
152	kita lakukan termasuk pendekan2 yg	
153	dilakukan oleh ket DPW dalam bentuk	
154	koordinasi langsung secara personal untuk	
155	bisa mendorong berbagai macam kegiatan	
156	yang mana secara organisasi tidak berjalan	
157	maka kemudian ketua DPW berkewajiban	
158	mendorong dan memberikan gaident agar	
159	program tersebut tetap terlaksana.	
160	Strategi politik apa yang sudah diterapkan	
161	sejauhini?	
162	Yang pertama, kebijakan politik yang kita	
163	ambil adalah; memantapkan pemilih-pemilih	
164	fanatik PPP yang selama ini mendukung	
165	penuh itu menjadi prioritas utama sebagai	
166	pilar kekuatan PPP. Ketiga, melakukan	
167	pembinaan dari program kepada simpatisan-	
168	simpatisan PPP yang mungkin selama ini	
169	dalam perkembangan era politik menjadi	
170	ragu karena persoalan ideology yang dulu	
171	menjadi aicon partai menjadi aicon2 yg	
172	berubah stratanya menjadikan partai politik	
173	sama saja. Keempat, meraih kembali para	
174	pemilih PPP yang dulu hijrah ke partai lain,	
175	jadi ketika revormasi itu berjalan kebijakan	
176	parpol berubah, semulanya 3 partai menjadi	
177	banyak partai maka jujur pilar2 partai itu	
178	banyak yg hijraah, maka kami punya inisiatif	
179	untuk menarik kembali, dalam kebijakan	
180	muktamar menyatakan bahwa membangun	
181	rumah besar umat islam; yang berarti	
182	menarik kembali kader2 yang lenyap oleh	

183	perkembangan politik PPP akan	
184	ditarik/diajak kembali ke PPP, tetapi secara	
185	khusus persoalan kebangsaan adalah	
186	persoalan moralitas, artinya PPP sebagai	
187	partai yang berasaskan islam harus	
188	menunjukkan jati dirinya sebagai partai	
189	bermoral.	
190	Bagaimana dampak terhadap citra partai	
191	dari konsolidasi dan koordinasi di internal	
192	terhadap perkembangan di masyarakat?	
193	Betapapun belum bisa diukur secara	
194	maksimal, tetapi yang pertama, aicon PPP	
195	tidak berkorupsi ini tampak di tengah	
196	masyarakat, betapapun jujur banyak yang	
197	kena kasus karena bombardier publikasi	
198	media dan gerakan KPK maka terkesan	
199	partai-partai itu korupsi sementara PPP	
200	masih menjadi partai yang bersih. Secara	
201	pribadi sebagai mantan DPC dan DPW selalu	
202	mengambil kebijakan dalam garda terdepan	
203	untuk melakukan gerakan politik anti korupsi	
204	sehingga gerakan LSM yang terkait melawan	
205	anti korupsi itu pasti PPP menjadi bemp	
206	kegiatan politik.	
207	DPW PPP jika melihat hasil survei yang	
208	dilakukan oleh lembaga-lembaga survei,	
209	sejauh ini bagaimana menyikapi kondisi hasil	
210	survey tersebut?	
211	Khawatir itu ada tetapi ada prinsip dasar	
212	yang optimis, karena PPP punya asas	
213	keislaman yang didalam pokok2 garis	
214	perjuangan partai itu mengedepankan	
215	prinsip akidah, ibadah dan moralitas. Ketika	
216	banyak partai melakukan korupsi, maka	
217	disisi lain kita punya keyakinan kalo PPP ini	
218	istiqomah menegakkan prinsip tersebut dan	
219	menegakkan amar makruf nahi mungkar rasa	
220	optimis dan yakin tetap ada.	
221	Secara garis besar apakah penerapan	
222	menejeman organisasi di DPW PPP	
223	Yogyakarta sudah berjalan sesuai dengan	
224	aturan partai?	
225	Kalo saya boleh mengatakan bahwa secara	
226	umum sudah bisa dilakukan sesuai dengan	
227	garis2 kebijakan partai tetapi pernyataan	
228	semacam itu juga belum bisa dijadikan	

229	jaminan tapi jujur di akui karena	
230	keterbatasan dari SDM dan sumber dana	
231	kita, maka kebijakan2 itu belum semua bisa	
232	di eksekusi. Misalnya.. sampai detik ini,	
233	ujung tombak KPP kita masih sedang dalam	
234	proses, dengan merekrut 8000 sekian TPS	
235	dengan 2 kader ditingkat pembelian suara,	
236	itu juga bukan kerja yang mudah,karena	
237	sumber anggaran kita ini terbatas,misalnya;	
238	merekrut dan mentraining kader dalam 6	
239	bulan ini memerlukan anggaran yang cukup	
240	besar.	



1. **Nama Lengkap** : **Drs. Ma'sum Amrullah**
2. **Tempat dan tanggal lahir** : **PangkalanBalai, 23 September 1958**
3. **Jenis Kelamin** : **Laki-laki**
4. **Agama** : **Islam**
5. **Status Perkawinan** : **Kawin**
6. **Alamat Tempat tinggal** : **Jatimulyo, Kricak TR. I/793 B RT. 12/03
Yogyakarta 55242
HP. 0815 7843 9015; 0812 2815 3817.
e-mail: aibnuyassin@yahoo.com**

7. **RiwayatPendidikan** : **SDN Pangkalan Balai, tamat 1973
SMP Pangkalan Bali, tamat 1976
SMA Methodist 1 Palembang, tamat 1980
UniversitasMuhammadiyah Yogyakarta
(UMY), Fisipol, tamat 1991**

8. **Kursus/Diklat** : **1. Sebagai Penatar P4 Tingkat Provinsi
DIY, Lulus tahun 1984
2. Pelatihan Kader Nasional DPP PPP,
Lulus tahun 2005.
3. Fasilitator Tingkat Nasional, DPP. PPP
Lulus, tahun 2008
4. Fasilitator Tingkat Nasional, DPP PPP,
Lulus, Tahun 2012**

9. **RiwayatOrganisasi** : **1. Ketua SEMA Fisipol UMY, 1983
2. Ketua 1 SMPT UMY, 1984
3. KetuaUmum SMPT UMY, 1986
4. Ketua KORKOM IMM UMY, 1986
5. KetuaUmum DPD IMM DIY, 1988
6. Sekretaris BPK. PWM DIY, 1990-1995
7. WakilKetua PM. DIY, 1987-1993
8. WakilKetua PW. GMPI. DIY, 1998
9. Wakil SEKJEN PP. GMPI,1998- 2003.
10. Wakil. Sek. DPW. PPP. DIY, 2006-2011
11. WakilKet. DPW PPP DIY, 2011-2016**

10. Riwayat Pengalaman kerja: 1. CV. Melati Utama, sebagai Manager, tahun 1988 - 1993.

Nusantara Jaya Inc, sebagai Manager tahun 1993 - 1998.

Tenaga ahli Fraksi DPRD DIY 2009-2012

11. Lain-lain : 1. Sebagai Pemakalah Dalam seminar Nasional & Regional

2. Sebagai Kontributor Artikel, Koran, Tabloid



Kode: W2

NO.	Hasil Wawancara	Reduksi Kata
1 2	Apakah anda tahu tentang program DPW PPP Yogyakarta kepengurusan 2010-2015?	
3 4 5 6 7	Jadi itu periode sekarang? Iya pak..iya tau.. tau.. prongram PPP klo di klasifikasi secara garis besar adalah program strategis, pernyataan politik dan organisasi, kalo program strategis itu terkait yg kamu teliti ini yaitu masalah pemilu.	
8 9	Bagaimana implementasi program tersebut terhadap perjalanan organisasi partai?	
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	Tidak semua progam yang disusun di muswil itu pyur bias terlaksana. Ya misalnya sector pertanian, organisasi, dakwah, kepemudaan, perempuan itu tidak maksimal, yaa yang paling berjalan baik itu ya sector pemenangan pemilu, artinya secara umum program kepartaian yang paling menonjol ditiap perode itu adalah program pemlu, artinya bias kita liat dengan nyata. Baik gerakan, perhatian, pendanaan dan personil semuanya terlibat dengan baik dan sinergis.	
20 21 22	Apakah dari implementasi program tersebut dapat berpengaruh pada pola roda organisasi partai?	
23 24 25 26 27 28	Ehhh pengaruh itu.. misalkan begini.. program pemenangan pemilu, tentunya bila berjalan sesuai scenario tentunya akan menampilkan kursi perwakilan yang signifikan atau bidang perempuan jika berjalan dengan baik maka otomatis dinamika soal perempuan akan semarak.	
29	Bagaimana saat ini pola organisasi berjalan?	
30 31 33 34 35 36	Ya tentunya berjalannya organisasi hari ini sesuai petunjuk ADART, dibawah kendali control ketua dan sekretaris wilayah dibantu dengan ketua dan sekretaris yg membidangi masing2. Tentunya secara kolektif di control oleh ketua dan sekretaris wilayah.	
37 38 39	Apakah pola organisasi yang diterapkan di DPW PPP Yogyakarta telah sesuai dengan teori manajemen?	
40 41 42 43 44	Ya saya piker secara umum..insyallah sudah memasuki.. misalkan plening, organizing, actuating, kontroling, evaluasi,, intinya prinsip manajemen secara umum itu sudah memasuki.. itu tapi itu semua sangat dipengaruhi oleh gaya	

45	kepemimpinan, watak asli organisasi itu, contoh,	
46	PPP dalam masalah keuangan sangat ketat.	
47	Bagaimana manajemen organisasi partai anda	
48	dalam persiapan pemilu legislative pada 2014	
49	mendatang?	
50	Dari persiapan administrative itu inklud dengan	
51	manajemen partai ditambah dengan manajemen	
52	kepanitiaan, manajemen induk organisasi itu	
53	sebagai induk dasar, manajemen administratif	
54	kepanitiaan yang sifatnya kontemporer, kedua	
55	nya itu saling melengkapi. Lah..mbakrina itu	
56	posisinya sebagai pengendali administratif induk,	
57	pak bambang dan mas unyil itu sebagai operator	
58	manajemen administrative kepanitiaan . Kalau	
59	ditanya kesiapanya..lazziz.. dikatakan tidak ya	
60	siap, dikatakan siap ya tidak. Tapi pada	
61	prinsipnya itu sudah siap dan sudah berjalan.	
62	Sejauh ini bagaimana pola koordinasi terhadap	
63	DPC DPW PPP Yogyakarta yang anda amati?	
64	Saya terlibat..pengalaman saya di PPP sih mulai	
65	pemilu 1992 sampai 2009, macam-macam	
66	posisinya, yang paling banyak di posisi sekretaris	
67	LP2 dan diposisi ketua LP2 ya di pemilu 2014	
68	ini. 70-75 persen lebih itu kader semua yang	
69	sudah tersebar dalam beberapa dapil di DIY, itu	
70	adalah sumber SDM yang sudah kami pasang	
71	diposisi mereka yang strategis. Cukup intens pola	
72	yang kita bangun, kordinasi Antara DPW-DPC,	
73	DPC-PAC, satu tahun seblelum pemilu 2014	
74	sudah mengeserkan pola rekruiement calonkan	
75	didat dan menyiapkan batin mereka untuk	
76	mencalonkan diri, lalu ada acara taaruf caleg dan	
77	setiap kabupaten kita tanyakan terkait kesiapan	
78	lahir batin.	
79	Apakah anda mengamati proses koordinasi	
80	tersebut sudah sesuai dengan pola manajemen	
81	secara konsep teoritis koordinasi tersebut?	
82	Ya saya terlibat di dalamnya.. pola kordinasi	
83	antar level pimpinan itu tentu melibatkan unsur-	
84	unsur kordinasi, di sana ada problem yang	
85	dibicarakan, membentuk agenda bersama,	
86	memecahkan masalah bersama, menentukan	
87	momentum bersama. Nah oleh karena saya	
88	terlibat di dalamnya saya sangat tahu betul.Yang	
89	pertama saya terlibat di dalamnya, yang kedua	
90	ikut berbicara, ketiga jadi aktor, keempat ikut	

91	mengatur hehehe. Secara teoritik mungkin kami	
92	tidak banyak tau mas ya, tapi secara umum	
93	prinsip itu sudah terpenuhi dengan baik dan	
94	berjalan. Tapi kan semua agenda itu di ukur	
95	dengan out put mas hehehe.	
96	Strategi politik apa yang sudah diterapkan sejauh	
97	ini?	
98	Ini yang sebenarnya sangat beragam teori kita,	
99	setiap pemilu bisa berubah karena sesuai dengan	
100	undang-undang politik yang sudah di atur oleh	
101	pemerintah. Nah..pemilu 2014 tidak jauh berbeda	
102	dengan 2009 kalau undang-undang parpolnya	
103	yang paling banyak itu justru pembaharuannya di	
104	seperti partai politik kalau di undang-undang	
105	pemilu sedikit, paling ada penegasan dari PKPU.	
106	Untuk strategi itu PPP mengikuti alur UU parpol	
107	UU kemenangan pemilu 2014, contoh begini;	
108	bagaimana mensiasati suara terbanyak? Karena	
109	pemilu 2009 adalah terkenal dengan pemilu yang	
110	transaksional ,suara dibeli oleh para kandidat.	
111	Untuk besok strategi kita bagaimana membangun	
112	semangat, baik kebersamaan dalam partai	
113	maupun kandidat di dapil dan tim sukses masing-	
114	masing. Prinsip kita yang utama di setiap dapil	
115	masing-masing harus mendapatkan kursi. Yang	
116	paling penting lagi kita besok tidak akan	
117	menggunakan kampanye hura-hura dalam artian	
118	kita akan menggunakan cara blusukan seperti	
119	gaya jokowi, saya sudah bilang sama ketua DPW	
120	bahwa “semua pendanaan kampanye akan di kita	
121	alokasikan pada para kandidat semua” Alat-alat	
122	peraga kampanye secukupnya lebih fokus pada	
123	sosialisasi.	
124	DPW PPP jika melihat hasil survei yang	
125	dilakukan oleh lembaga-lembaga survei, sejauh	
126	ini bagaimana menyikapi kondisi hasil survey	
127	tersebut?	
128	Eeehhh.. kalau disurvei saya pikir ini lain ya tidak	
129	terlalu jelek dan tidak terlalu bagus! Hehehe pasti	
130	ada dampak..bisa kita liat di pusat sampai PAC	
131	tidak ada konflik yang signifikan. Sedangkan di	
132	partai lain sudah marak riak-riak konflik internal	
133	dan problem hukum diparlemen. Secara terbuka	
134	kita tidak menyikapi tapi kita menyikapi secara	
135	internal/tertutup, yaa ada 2 hal yang kita tanggapi	
136	dalam rapat-rapat, bisa jadi itu hasil survey yang	

137	betul-betul tidak ada muatan politik karena	
138	kesannya melibatkan semua partai politik tapi	
139	tidak berkemungkinan ada udang dibalik kodok	
140	yaaa.. bagaimanapun juga di Indonesia siapa yang	
141	tidak mau dibayar? Jadi kita tidak percaya 100	
142	persen pada hasil survey itu, Tapi kita ambil	
143	hikmah dari hasil pemilu yang dahulu. Ya kita	
144	tanggapi positif di internal, bahkan hal itu kita	
145	buat bahan evaluasi bukan jadi bahan rujukan	
146	penuh. Paling tidak kita.. misalnya contoh begini;	
147	PPP itu kalau hari ini melaksanakan pemilu	
148	suaranya sekian persen, artinya tingkat	
149	popularitas kita kan kalah dengan partai lain..	
150	PDIP, DEMOKRAT, GOLKAR unggul, naah!	
151	Saya tunggu ada gak survey yang khusus itu	
152	terkait kasus PKS dan DEMOKRAT? Gak ada	
153	hari ini.. bagaimana hari ini kalo diadakan	
154	survey? Bagaimana PKS bagaimana	
155	DEMOKRAT? Disitu saya lihat bagaimana ini	
156	lembaga survey kenapa?	
157	Secara garis besar apakah penerapan manajemen	
158	organiasi di DPW PPP Yogyakarta sudah	
159	berjalan sesuai dengan aturan partai?	
160	Insyaallah..karena kitab sucinya PPP itu anggaran	
161	dasar rumah tangga itu mutlak!, anggaran dasar	
162	dan rumah tangga itu disusun tidak meninggalkan	
163	dari prinsip-prinsip manajemen modern.	
164	Tentunya juga kita melakukan control kolektif	
165	sesuai level masing-masing, yaa DPP, DPW,	
166	DPC dan PAC. Indikasi sebuah manajemen itu	
167	berjalan sesuai prinsip-prinsip manajemen salah	
168	satunya organisasi hidup, bergerak, berjalan	
169	sesuai program kerja, tidak statis melewati	
170	tahapan demi tahapan sesuai dengan putusan	
171	pimpinan di masing-masing level.	

Bambang Aris Sujoko

Riwayat Pendidikan: SD,SMP,SLTA

Riwayat Organisasi:

Ranting, 1981-1883

PAC Kec. Ngampilan 1984-1987

Pemuda DPC Kota 1988-1992

Koman dan satgas kota 1992-2002

Wakil Ketua DPC Kota 1995-2010

Wakil Sekjend DPW PPP DIY 2011-2016

Kode: W3

NO.	Hasil Wawancara	Reduksi Kata
1	Apakah anda tahu tentang program DPW PPP	
2	Yogyakarta kepengurusan 2010-2015	
3	Program partai secara umum yang pertama,	
4	adalah pembinaan umat dalam rangka untuk	
5	pemenangan pemilu 2014. Yang Kedua, adalah	
6	program untuk sebenarnya lebih pada masyarakat	
7	yaitu pendewasaan berpolitik masyarakat hingga	
8	masyarakat tau betul terhadap politik bagaimana	
9	berpolitik yang baik dan benar dan memahami	
10	politik sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi	
11	mereka yang tepat dan PPP adalah partai yang	
12	sebenarnya partai yang murni untuk	
13	kemaslahatan umat dan agama.	
14	Bagaimana implementasi program tersebut terhadap	
15	perjalanan organisasi partai?	
16	PPP ditingkat propinsi itu kan punya elemen	
17	organisasi di tingkat Cabang, kecamatan, anak	
18	cabang, ranting; implementasinya adalah terinteraksi	
19	satu sama lain. Kedua adalah organisasi	
20	kepemudaan di semua elemen. Dilapangan memang	
21	terjadi ketidak maksimalan karena kendala sumber	
22	dana yang kurang memenuhi program yang	

23	direncanakan.	
24	Apakah dari implementasi program tersebut dapat	
25	berpengaruh pada pola roda organisasi partai?	
26	Sangat berpengaruh karena dengan berinteraksi	
27	dengan semua elemen masyarakat, tentunya ada dua	
28	sisi yang perlu kita lakukan. Yang pertama; kita	
29	menyampaikan program partai yang kedua mereka	
30	setidaknya menyampaikan aspirasinya kepada kita	
31	sehingga kita dapat mengerti keinginan mereka dan	
33	kita dapat bekerja sesuai kebutuhan aspirasi mereka	
34	yang selama ini menjadi problem.	
35	Bagaimana saat ini pola organisasi berjalanan?	
36	Mulai tingkat wilayah sampai tingkat cabang dan	
37	anak cabang namun sampai tingkat ranting terjadi	
38	hambatan-hambatan karena keterbatasan kualitas	
39	kader, disitu kita harus membenahi agar semua	
40	program dari elemen atas sampai kebawah dapat	
41	berjalan sesuai yang direncanakan.	
42	Apakah pola organisasi yang diterapkan di DPW	
43	PPP Yogyakarta telah sesuai dengan teori	
44	manajemen?	
45	Kalau dengan teori manajemen partai sudah	
46	terlaksanakan walau belum terlaksana dengan	
47	maksimal, karena struktur organisasi sudah tertata	
48	dengan baik namun implementasinya belum	
49	maksimal di lapangan. Karena lemahnya sinergitas	
50	antar elemen yang ada di partai sehingga dapat	
51	menghasilkan program yang minus.	
52	Bagaimana manajemen organisasi partai anda	
53	dalam persiapan pemilu legislative pada 2014	
54	mendatang?	
55	Di dalam pemenangan pemilu PPP kan dibentuk	
56	yang disebut lajnah pemenangan pemilu LP2, LP2	
57	itu mengelola yang pertama dalam rangka	
58	rekrutment penyaringan dan penetapan calegPPP,	
59	lajnah penetapan calon yang menentukan urutan	
60	caleg sesuai dapil masing2. Kemudian manajemen	
61	pemenangan pemilu dikelola oleh lajnah	
62	pemenangan pemilu dilaksanakan oleh lajnah	
63	pemenangan pemilu LP2 sesuai tingkatan dan	
64	wilayah masing-masing.	
65	Sejauh mana anda terlibat dalam proses persiapan	

66	tersebut?	
67	Ya karena posisinya di sekretaris LP2 tingkat 1;	
68	tugasnya mengelola manajemen pemenangan pemilu	
69	itu sendiri, adalah menata semua elemen sampai di	
70	ditingkatan TPS.	
71	Siapa saja yang didelegasikan untuk mewakili partai	
72	pada pemilu legislatif di pemilu 2014 mendatang,	
73	baik DPR RI ataupun DPRD?	
74	Calon yang kepusatituada 8 caleg yang dicalonkan	
75	saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu terlalu	
76	banyak..	
77	Sejauh ini bagaimana pola koordinasi terhadap DPC	
78	DPW PPP Yogyakarta yang anda amati?	
79	Kalau kordinasi dengan DPC-DPC,DPC-PAC-	
80	Ranting Sudah ada rapat rutin mingguan, diluar	
81	structural organisasi kami sudah melakukan	
82	kordinasi, seperti kelompok-kelompok pertanian,	
83	kelautan, bahkan elit2 simpatisan partai, seperti	
84	parmusi, muhammadiyah, Nahdatul Ulama dll	
85	sedang kita lakukan.	
86	Apakah anda mengamati proses koordinasi tersebut	
87	sudah sesuai dengan pola manajemen secara konsep	
88	teoritis?	
89	Terkadang konsolidasi tidak bisa kita lakukan sesuai	
90	konsep yang sangat teoritis akademis, karena	
91	kondisi lapangan terkadang berbeda.	
92	Sejauh mana anda mengetahui terhadap koordinasi	
93	tersebut?	
94	Saya banyak mengikuti seringada laporan2 sendiri	
95	kepada kami dari DPC-DPC.Ya sesuai ADART di	
96	sana sudah di atur semua pola organisasi dan	
97	manajemennya.	
98	Strategi politik apa yang sudah diterapkan sejauh	
99	ini?	
100	Dalam rangka pemenangan pemilu 2014	
101	disamping penguatan kader partai/para pimpinan	
102	partai dari tingkat wilayah sampai tingkat ranting.	
103	Kedua penguatan caleg PPP dalam menghadapi	
104	pemilu, dua hal ini harus berjalan sinergis.	
105	Kemudian para caleg dari PPP dapat	
106	menyelenggarakan kampanye sesuai strategi mereka	
107	dan sesuai dana yang ada. Prinsip dari PPP tidak	

108	akan memberatkan calon-calon itu sendiri dan tidak	
109	menutup kemungkinan caleg yang terkait akan	
110	mengeluarkan dana pribadi mengingat anggaran	
111	DPW sendi sangat terbatas.	
112	Bagaimana dampak terhadap citra partai dari	
113	konsolidasi dan koordinasi di internal terhadap	
114	perkembangan di masyarakat?	
115	Dengan selogan PPP yang baru bahwa PPP sebagai	
116	rumah besar umat islam. Kedua terkait dengan citra	
117	partai terhadap anggota dewan di tingkat pusat saya	
118	tidak menafikan sebagian oknum dipusat yang	
119	terkena kasus-kasus korupsi. Namun dibandingkan	
120	dengan partai-partai lain PPP bersih dari oknum-	
121	oknum yang tidak bertanggungjawab, dengan	
122	gerakan-geran moral kita yang selama ini kita	
123	bangun sehinga paling tidak PPP masih bersih. Akan	
124	tetapi kita tetap harus berjuang sekaligus	
125	membuktikan dengan hasil suara dalam pemilu 2014	
126	yang akan datang.	
127	DPW PPP jika melihat hasil survei yang dilakukan	
128	oleh lembaga-lembaga survei, sejauh ini bagaimana	
129	menyikapi kondisi hasil survey tersebut?	
130	Ya kami menyikapi dengan intropeksi diri, itu	
131	sebagai cambuk bagi PPP dalam rangka	
132	meningkatkan kualitas agar PPP lebih baik lagi	
133	dalam aspek apapun.	
134	Secara garis besar apakah penerapan menejeman	
135	organiasi di DPW PPP Yogyakarta sudah berjalan	
136	sesuai dengan aturan partai?	
137	Sesuai aturan yaa tapi masih banyak yang harus di	
138	benahi karena aturan yang ada dalam ADART	
139	implementasi di lapangan ada tambahan-tanbahan	
140	dan langkah-langkah yang baru tergantung kondisi	
141	yang selalu berubah. Sikap kita selama ini kita selalu	
142	mengevaluasi dan terus mengevaluasi agar semua	
143	dapat berjalan sesuai koridor agama dan organisasi	
144	yang ada.	